



## Analisis Dynamic Governance pada Program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat di Kota Denpasar

Ni Putu Dinda Kalpika Putri\* dan Carrollina Augi Widya Putri

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa

\*E-mail correspondence: [dindakalpika94@gmail.com](mailto:dindakalpika94@gmail.com)

### Abstract

*Good governance must be built so that the ideals of the Indonesian people contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph can be realized. To realize this, the Government of Indonesia is focusing on changes to 8 main areas contained in the 2010-2025 Bureaucratic Reform Grand Design which are focused on excellent service to the community. The government is expected to be able to implement dynamic governance, according to the changing times but not ignoring the needs of the community. However, in carrying out this governance of course there is an obstacle especially, in the health sector services at the Denpasar City Health Office. The mobility of the population is quite high and the pre-hospital services available to the people of Denpasar City are quite limited so to overcome this, the Denpasar City Government innovates to form a Health program namely Denpasar Mantap Community Health or DAMAKESMAS. This program is coordinated by the Denpasar City Health Office and collaborates with the Denpasar City BPBD and the Denpasar City Communication, Informatics and Statistics Office. This research was conducted to analyze and observe DAMAKESMAS management from dynamic governance. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Research data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DAMAKESMAS Program can reflect a dynamic theory of governance even though there are no more detailed improvements related to rules and regulations which tend to be more flexible.*

**Keywords:** DAMAKESMAS program; dynamic governance; thinking ahead, thinking again, thinking across

### Abstrak

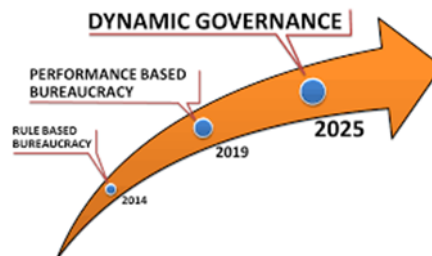
Tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun agar cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 pada alenia keempat dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Indonesia memfokuskan perubahan 8 area utama yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang difokuskan pada pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, sesuai perkembangan jaman namun tidak menyampingkan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan tersebut tentunya ditemukan adanya sebuah kendala khususnya pada pelayanan bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Mobilitas penduduknya cukup tinggi dan pelayanan pra-rumah sakit yang tersedia untuk masyarakat Kota Denpasar terbilang cukup terbatas sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar berinovasi membentuk program Kesehatan yaitu Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat atau DAMAKESMAS. Program ini dikoordinatori oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar serta berkolaborasi dengan BPBD Kota Denpasar dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan melihat pengelolaan DAMAKESMAS dari dynamic governance. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program DAMAKESMAS ini mampu merefleksikan teori tata kelola yang dinamis meskipun belum ada perbaikan yang lebih detail terkait dengan aturan dan regulasi yang cenderung lebih fleksibel.

**Kata Kunci:** program DAMAKESMAS; dynamic governance; pelayanan prima

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan tonggak terpenting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana cita-cita Negara Indonesia yang telah terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, hal ini menjadi kewajiban Pemerintah beserta masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu upaya yang dijalankan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dimana reformasi birokrasi berfokus pada perubahan pada 8 area utama sebagai pilar penting yang menentukan kualitas pemerintah, salah satunya yaitu mencapai pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (Pajri, 2018). Dalam proses jangka panjang tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) pada tahun 2025.



Gambar 1. Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi Indonesia

Konsep dynamic governance menjadi acuan untuk Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tata kelola pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima seperti di Negara Singapura yang berhasil menerapkan dynamic governance. Konsep dasar dalam Dynamic Governance adalah mengkombinasikan budaya dan kapabilitas untuk berpikir ke depan (thinking ahead), berpikir lagi (thinking again), dan berpikir lintas batas (thinking across) guna menghasilkan suatu perubahan nyata (Kusuma, 2015). Sehingga diperlukan penerapan dynamic governance secara lebih konsisten sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat.

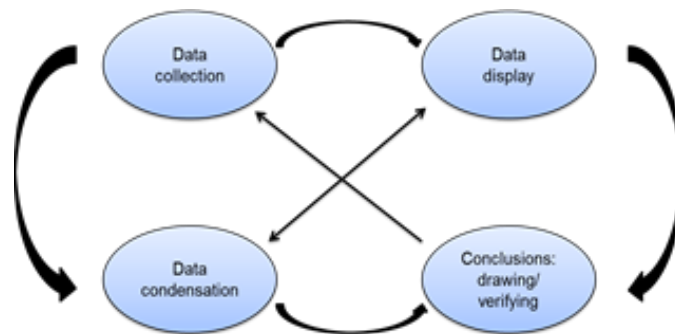
Pemerintah Kota Denpasar dalam menangani permasalahan di bidang pelayanan kesehatan berinovasi dengan mencanangkan sebuah program yaitu program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat. Program ini dibentuk karena Kota Denpasar merupakan titik sentral dalam kegiatan pemerintahan di Provinsi Bali. Adapun kendala yang dialami Kota Denpasar yaitu Kota Denpasar hanya memiliki 11 Puskesmas dan 25 Puskesmas Pembantu (Pustu). Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar menyatakan bahwa penduduk Denpasar sepanjang tahun 2020 berjumlah 962.900 jiwa. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, program inovasi bidang kesehatan yang telah tertera pada Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/1219/HK/2019, program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat (DAMAKESMAS) merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Walikota Denpasar khususnya di bidang kesehatan.

Dalam menjalankan program DAMAKESMAS ini terdapat kolaborasi antara tiga instansi yaitu Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar dan Dinas Kominfo Kota Denpasar, dengan melihat adanya kolaborasi tersebut berarti terjadi interaksi antara *government to government* (G2G) dan program ini juga melibatkan masyarakat sebagai keluarga binaan yang mana biasanya dilakukan pengunjungan secara rutin untuk mengecek kesehatannya, hal ini menunjukkan pola interaksi *government to citizens* (G2C). Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui program DAMAKESMAS tersebut, namun berdasarkan observasi awal ditemukan adanya kendala yaitu saat ini program DAMAKESMAS masih dalam tahap penyesuaian terhadap penerapan aplikasi. Aplikasi yang ada pada saat ini hanya bisa digunakan pada internal dalam pengelolaannya, belum bisa diakses oleh masyarakat umum. Peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang DAMAKESMAS karena program DAMAKESMAS merupakan program inovasi kebijakan yang mana digunakan untuk

membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pra-rumah sakit. Program inovasi DAMAKESMAS ini merupakan program inovasi yang masuk nominasi 10 Besar *Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) Innovation Awards III* pada tahun 2019. Maka, peneliti ingin menganalisis proses pengelolaan DAMAKESMAS di Kota Denpasar dalam perspektif *dynamic governance*.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan program DAMAKESMAS di Kota Denpasar dalam perspektif *dynamic governance*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan dengan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Denpasar, BPBD Kota Denpasar dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Denpasar, masyarakat yang pernah menggunakan layanan program DAMAKESMAS serta dokumentasi untuk memperoleh bagaimana gambaran interaksi yang terjadi dalam pengelolaan program tersebut. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model dari (Miles, Huberman & Saldana, 2014) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Sebagaimana proses pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain seperti gambar 2:



Gambar 2. Analisis data Model Miles, Huberman dan Saldana, 2014

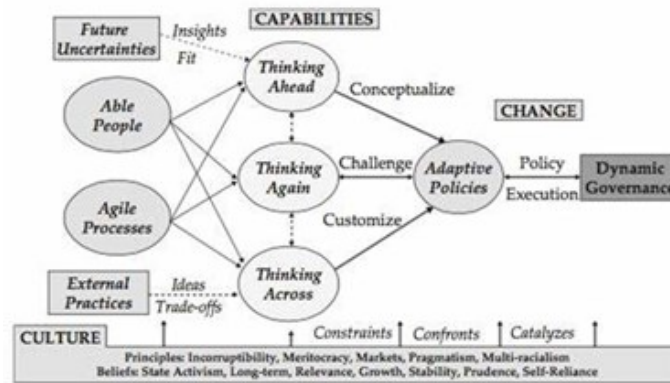
## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Dynamic Governance*

*Dynamic governance* merupakan konsep yang berfokus pada faktor eksternal lingkungan kebijakan. Untuk membuat pemerintahan dinamis menjadi nyata maka adaptasi terhadap suatu kebijakan tentunya memegang peranan penting didalamnya namun, dijalankannya adaptasi kebijakan ini bukan sekadar reaksi yang pasif terhadap tekanan eksternal melainkan merupakan pendekatan proaktif terhadap inovasi kontekstualisasi, dan eksekusi. Konsep *dynamic governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Adapun konsep dasar *dynamic governance* adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik (Fauzi & Iryana, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Dynamic Governance* yang dikemukakan oleh Neo and Chen. Neo dan Chen (Boon & Geraldin, 2007) mengemukakan bahwa *Dynamic governance* adalah “*Dynamic Governance is the ability of a governance to continually adjust it is public policies and programs as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests of the nation are achieved*”.

Menurut Neo dan Chen, pada dasarnya konsep *dynamic governance* tertuju pada perubahan yang hanya menekankan pada dua kunci penting, yaitu *Capalities* dan *Culture*. Oleh karena itu, Neo dan Chen merumuskan kerangka pemikiran sederhana yang mengacu pada terbentuknya konsep *dynamic governance* sebagai berikut



Gambar 3. Kerangka Pemikiran *Dynamic Governance*

### Program DAMAKESMAS

Pada tahun 2005 dibentuk 2 *Public Safety Center* (PSC) untuk penanganan gawat darurat sehari-hari pra-Rumah Sakit yang pelayanannya terbatas hanya melayani transport dari lokasi ke Rumah Sakit terdekat dengan tenaga dari masyarakat umum yang sudah dilatih. Permintaan layanan pra-rumah sakit terus meningkat. Sesuai arahan dari Pemerintah Daerah, akhirnya Dinas Kesehatan Kota Denpasar membentuk suatu program yaitu DAMAKESMAS. Program DAMAKESMAS merupakan singkatan dari Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat dimana program ini sudah berdiri sejak 24 November tahun 2017 pencetus awal berdirinya program tersebut yaitu dari pimpinan daerah, Bapak Walikota terdahulu yaitu Bapak Rai Mantra memberikan ide untuk mengatasi penanganan pra-rumah sakit di Kota Denpasar. *MoU* (sejak bulan Mei 2019) antara RSUD Wangaya dengan 11 Puskesmas dalam program integrasi pelayanan Lansia/Geriatri melalui *home care* terpadu. Program ini diwujudkan untuk memberikan pelayanan prima berlandaskan swakedharmaan khususnya pada pelayanan kesehatan.

Program DAMAKESMAS ini terdiri dari dua pelayanan yaitu program SPGDT yaitu penanganan untuk pasien gawat darurat seperti kecelakaan maupun lain sebagainya dan Perkesmas yaitu penanganan pasien kunjungan ke rumah-rumah yang mana kedua program ini sudah ada sejak dulu dan sudah digariskan oleh Menteri Kesehatan hanya saja pada program ini, semuanya dimantapkan lagi dalam beberapa aspek yaitu:

Memantapkan dengan menambahkan tenaga yang berkompeten, seperti dokter, perawat, bidan juga tenaga sopir.

Memantapkan koordinasi dan integrasi. Sebelumnya masing-masing instansi menjalankan tugasnya masing-masing. Tapi kini Dinas Kesehatan Kota Denpasar dibantu oleh BPBD Kota Denpasar serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Denpasar.

Memantapkan sarana dan prasarana. Dengan adanya aplikasi sebenarnya dan penggunaan TAB dimasing-masing pos yang akan digunakan untuk mendata seluruh pasien yang telah ditangani melalui program DAMAKESMAS tersebut.

Dalam pengelolaan program DAMAKESMAS ini terdapat kolaborasi antar *stakeholder*, berikut tabel yang menggambarkan masing-masing peran pemangku dalam pengelolaan DAMAKESMAS:

### Analisis Dynamic Governance pada Program DAMAKESMAS

#### Capability

#### Thinking Ahead

Pada kemampuan *thinking ahead*, peneliti melihat dari beberapa faktor yaitu:

*Mental Preparedness*, Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah memprediksi bahwa adanya arus perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong pemerintah untuk berinovasi yaitu dengan dibentuknya program DAMAKESMAS guna membantu fasilitas kesehatan pra-rumah sakit dan pelayanan darurat hanya dengan menggunakan media telepon. Namun, setelah program ini dijalankan, tidak ada tinjauan lebih lanjut terkait dengan sosialisasi program kepada masyarakat. Hal

ini dilihat dari masih banyak masyarakat khususnya di Kota Denpasar yang belum mengetahui program ini. Untuk memantapkan *mental preparedness* ini, Dinas Kota Denpasar menyediakan *ambulance*. Sehingga ambulance tersebut diharapkan dapat lebih mengefisienkan waktu dalam hal pemberian pelayanan masyarakat.

*Flexibility*, untuk mengetahui fleksibilitas dari layanan program DAMAKESMAS, maka peneliti menilai dari Standar Operasional Prosedur layanan tersebut. Peneliti menemukan bahwa pemberian layanan program DAMAKESMAS belum mencapai tingkat fleksibel, dikarenakan sistem aplikasi masih terbatas sehingga pelayanan lebih sering menggunakan media telepon dan HT. Layanan ini terdiri dibeberapa titik yaitu PSC Juanda di Renon, PSC Merpati di Denpasar Barat, Puskesmas 1 Denpasar Timur jalan Pucuk, Puskesmas 4 Denpasar Selatan di jalan Pulau Moyo dan Puskesmas Pembantu Dauh Puri Peambingan jalan Pulau Buru.

Adapun fleksibilitas dapat dilihat dari kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM dan sarana prasana yang dimiliki:

**Tabel 1.** Jumlah Sumber Daya Manusia

No.	SDM	Jumlah
1.	Dokter	55 orang
2.	Perawat	180 orang
3.	Bidan	120 orang
	Jumlah	355 orang

**Tabel 2.** Jumlah Sarana Kesehatan

No.	SDM	Jumlah
1.	Puskesmas Induk	11 buah
2.	Puskesmas Pembantu	25 buah
3.	Puskesmas Keliling	11 buah
	Jumlah	47 buah

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kota Denpasar tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut bahwa jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah memadai. Pak Ari selaku Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes Denpasar menyatakan bahwa jumlah sarana prasarana yang dimiliki saat ini menjadi hal penting dalam melayani masyarakat, Dinkes dengan berkolaborasi dengan BPBD Kota Denpasar dan Diskominfo Kota Denpasar terus bersinergi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari tabel tersebut, peneliti menilai bahwa program DAMAKESMAS sudah mencapai tingkat fleksibilitas.

#### *Openness*

Pada indikator berikut, peneliti menilai bahwa sikap Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan kesehatan itu kepada siapa saja tanpa memandang warga asli atau pendatang. Adanya kolaborasi dari para stakeholder juga merupakan salah satu indikator tercapainya *openness* pada program DAMAKESMAS karena adanya dukungan dari BPBD dan Diskominfo Kota Denpasar.



**Tabel 3.** Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Program DAMAKESMAS

No.	Peran	Temuan
1.	Pembuat Kebijakan	Walikota Denpasar pada periode
2.	Koordinator	(2016-2021), yaitu Bapak Rai Mantra Dinas Kesehatan Kota Denpasar
3.	Fasilitator	Dinas Kesehatan Kota Denpasar, BPBD Kota Denpasar serta Dinas Komunikasi, Informasi dan
4.	Implementor	Dokter SPGDT, Perawat, Bidan dan Pengemudi Ambulans
5.	Akselelektor	Tidak Ada

Sumber: hasil wawancara

### Culture

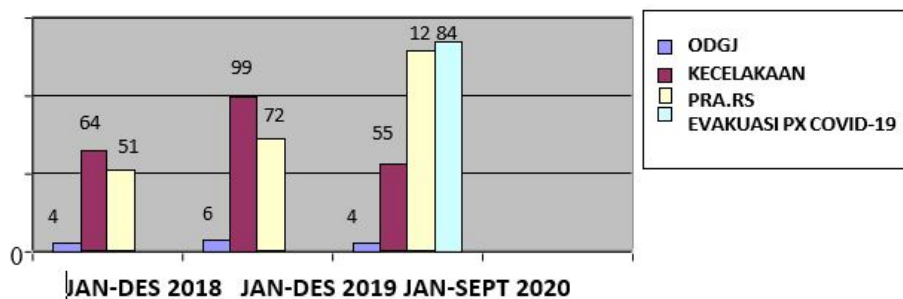
Pada indikator tersebut, peneliti melihat budaya organisasi yang terjadi dalam pengelolaan program DAMAKESMAS. Maka, peneliti melihat indikator culture dari beberapa aspek yaitu:

#### Promotif

Dinas Kesehatan Kota Denpasar selaku koordinator program DAMAKESMAS melakukan sosialisasi awal kepada para *stakeholder* sebelum program ini di *launching*. Sedangkan sosialisasi selanjutnya dilakukan pada kegiatan tertentu dengan menyisipkan penjelasan mengenai program DAMAKESMAS.

#### Preventif

Merupakan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Denpasar. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan untuk membantu proses pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sehingga dirancanglah program DAMAKESMAS. Adapun berikut data yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program DAMAKESMAS dalam kurun waktu 2018-2020:



**Gambar 4.** Grafik Pemanfaatan DAMAKESMAS

Berdasarkan grafik 1 di atas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan program DAMAKESMAS dalam Program SPGDT-S Kota Denpasar dari tahun 2018-2020 yaitu penanganan ODGJ dengan jumlah pasien paling tinggi yaitu pada tahun 2019 begitu pula pada penanganan kecelakaan, pasien kecelakaan dengan jumlah tertinggi yaitu pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penanganan pasien ODGJ dan kecelakaan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

#### Kuratif

*Kuratif* merupakan bentuk penyembuhan yang dilaksanakan oleh Dinkes Kota Denpasar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai layanan dari program DAMAKESMAS seperti sistem penanggulangan gawat darurat sehari-hari (SPGDTS), Pelayanan pra-rumah sakit dan program perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas). Perkesmas ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat serta meningkatkan kemandirian keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

#### Rehabilitatif

*Rehabilitatif* adalah prinsip Dinkes dalam melayani kesehatan untuk memulihkan kondisi

pasien di Kota Denpasar. *Rehabilitatif* dapat dilihat dari terlaksananya program pra-rumah sakit yang dijalankan oleh Dinkes Kota Denpasar untuk memberikan pemulihan kepada pasien.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, program DAMAKESMAS sudah sesuai dengan konsep *Dynamic Governance*. Karena program ini dibentuk untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, dimana menuntut adanya tanggapan yang cepat. Meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala, Dinkes Kota Denpasar terus mengevaluasi dan memperbaharui pelaksanaan program tersebut tiap tahunnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Aplikasi DAMAKESMAS sebaiknya dirancang untuk masyarakat umum, bukan hanya untuk internal pelaksana saja, diadakannya penjelasan lebih lanjut terkait dengan program DAMAKESMAS agar masyarakat Kota Denpasar mengetahui layanan tersebut serta perlu adanya peningkatan kembali dari segi sarana prasarana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dhewanto, W., Mulyaningsih, H. D., Permatasari, A., Anggadwita, G., & Amek, I. (2014). *Management Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta: Andi offset.
- Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Statistical Field Theor*, 53(9), 1689–1699.
- Kasim, Azhar. 2015. *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*. Jakarta: Buku Kompas
- Kusuma, B. M. A. (2015). Urgensi Dynamic Governance Dalam Meningkatkan Urgency Of the Dynamic Governance in Increasing. *Dakwah Annual Conference, NOVEMBER*, 1–15.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif " Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi"*. Jakarta: UI Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook - Third Edition*. Arizona: Arizona State University.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Cultures, Cappabilities, and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing. Retrieved from [http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan\\_Digital\\_2/PUBLIC%20ADMINISTRATION%20Dynamic%20governance%20%20embedding%20culture,%20capabilities%20and%20change%20in%20Singapore.pdf](http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/PUBLIC%20ADMINISTRATION%20Dynamic%20governance%20%20embedding%20culture,%20capabilities%20and%20change%20in%20Singapore.pdf)
- Pajri, E. H. (2018). Analisis Dampak pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamika Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor). *Jurnal Administrasi Negara, UNAIR*, 2(1), 22–30.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Rewansyah. A. (2011). *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIALAN.
- Suparta, I. K. (2023). *Dinas Kesehatan Denpasar rancang Program "Damakesmas"*. ANTARA News. Retrieved from <https://bali.antaranews.com/berita/124280/dinas-kesehatan-denpasar-rancang-program-damakesmas>
- Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/1219/HK/2019, program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat (DAMAKESMAS)